

**PREFERENSI SISWA DALAM MEMILIH INDUSTRI JASA KEUANGAN**  
**(Studi Pada Kegiatan Sosialisasi Otoritas Jasa Keuangan di SMA Negeri 7**  
**Kota Bengkulu)**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

OLEH:

**Resti Melinda Sari**  
**NIM 1516140294**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARI'AH**  
**JURUSAN EKONOMI ISLAM**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ( IAIN) BENGKULU**  
**BENGKULU, 2020 M/1441 H**

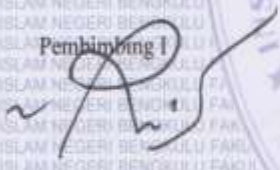
**PERSETUJUAN PEMBIMBING**


Skripsi yang ditulis oleh Resti Melinda Sari, NIM 1516140294 dengan judul "Preferensi Siswa dalam Memilih Industri Jasa Keuangan (Studi Pada Kegiatan Sosialisasi Otoritas Jasa Keuangan di SMA Negeri 7 Kota Bengkulu)", Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam Sidang *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 17 Desember 2019 M  
Rabi'ul-Akhir 1441 H

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. Nurul Hak, MA  
NIP. 196606161995031002

  
Yosy Arisandy, M.M  
NIP. 198508012014032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**  
**BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51270-51171-51172-53679 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.iainbengkulu.ac.id

**HALAMAN PENGESAHAN**

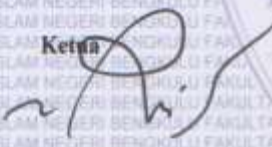
Skripsi yang berjudul "Preferensi Siswa dalam Memilih Industri Jasa Keuangan (Studi Pada Kegiatan Sosialisasi Otoritas Jasa Keuangan di SMA Negeri 7 Kota Bengkulu)" oleh Resti Melinda Sari NIM: 1516140294, Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 30 Januari 2020 / 5 Jumadil-Akhir 1441 H

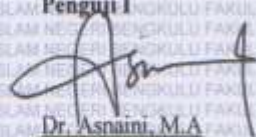
Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Perbankan Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).


Bengkulu, 12 Februari 2020 M  
18 Jumadil-Akhir 1441 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua  
  
Dr. Nurul Hak, MA  
NIP. 196606161995031002

Sekretaris  
  
Yosv Arisandy, MM  
NIP. 198508012014031001

Penguji I  
  
Dr. Asnani, M.A  
NIP. 197304121998032003

Penguji II  
  
Noni A. Prianty, ME  
NIP. 199304242018012002

Mengetahui,  
Dekan  
  
Dr. Asnani, M.A  
NIP. 197304121998032003

## *MOTTO*

*“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib  
suatu kaum*

*Sebelum mereka mengubah nasib mereka”*

*(QS. Ar Ra’du: 11)*

*“Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada  
keringanan*

*karena itu bila kau sudah selesai (mengerjakan yang  
lain)*

*Dan berharaplah kepada Tuhanmu”*

*(QS. Al-Insyirah: 6-8)*

## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- ✚ Untuk kedua orangtuaku tercinta Ayahku (Jumarto) dan Ibuku (Nasti Murni) yang telah mencurahkan kasih sayang yang tulus, dukungan, motivasi, serta doa yang selalu mengiringi langkahku.
- ✚ Untuk Adikku tercinta dan tersayang (Tiara Agustina) terimakasih atas semangat dan dukungan yang selalu diberikan kepadaku.
- ✚ Seluruh keluarga dari pihak ayah dan ibuku, nenekku,, datukku dan sepupu-sepupuku.
- ✚ Untuk Ayuk Sepupuku (Rapika Putri Yanti) yang sama-sama berjuang dalam penyelesaian tugas akhir ini dan selalu memberikanku semangat.
- ✚ Dosen Pembimbing terakhirku Bapak Dr. Nurul Hak, M.A, dan Ibu Yosy Arisandy, M.M selaku dosen pembimbing dan pembahas tugas akhir saya, terima kasih pak, bu karena saya sudah dibantu selama ini, terima kasih untuk nasehat dan ilmu yang telah diberikan kepada ku.
- ✚ Untuk sahabat kecilku Reza Anggraini yang selalu mendukungku dan menyemangatiku.
- ✚ Untuk Kebau Family (Mardiana, Evi Tamala, Cindy Grasela, Melati Rahaya Syafitri, Isti Sundari Apriani, Gizka Anggun Sari dan Liza Oktaviani) yang selalu Membantuku dan memberi semangat dalam keadaan apapun.
- ✚ Untuk Sahabat KKN ku Sumur Buruk Squad (Merky Handika (Abang), Indah Kurnia (Mbak), Dirahayu Mita Sari (Gembul), Haris Suwandi (Itam) yang

selalu membantuku dan selalu memberikanku semangat..

- ✚ Teman seperjuanganku Perbankan Syariah VIII G Angkatan 2015 yang telah memberikan semangat untukku.
- ✚ Almamaterku hijau tercinta Institut Agama Islam Negeri IAIN Bengkulu yang telah menempahku menjadi seorang yang lebih baik dari sebelumnya.

## SURAT PERNYATAAN VERIFIKASI PLAGIASI

Nama : Resti Melinda Sari  
NIM : 1516140294  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : PREFERENSI SISWA DALAM MEMILIH INDUSTRI JASA  
KEUANGAN (Studi Pada Kegiatan Sosialisasi Otoritas Jasa  
Keuangan di SMA Negeri 7 Kota Bengkulu)

Bahwasanya telah melakukan verifikasi plagiat melalui <https://smallseotools.com/plagiarism-checker/>. Skripsi yang bersangkutan dapat diterima dan tidak memiliki indikasi plagiat.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini maka akan dilakukan tinjauan kembali.

Bengkulu, Desember 2019 M  
Rabi'ul Akhir 1441 H

Mengetahui Tim Verifikasi



Dr. Nurul Hak, MA  
NIP. 196606161995031002

Mahasiswa yang menyatakan



Resti Melinda Sari  
NIM. 1516140294

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul "Preferensi Siswa dalam Memilih Industri Jasa Keuangan (Studi Pada Kegiatan Sosialisasi Otoritas Jasa Keuangan di SMA Negeri 7 Kota Bengkulu)", adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 17 Desember 2019 M  
Rabi'ul-Akhir 1441 H

Mahasiswa yang menyatakan



Resti Melinda Sari  
NIM 1516140294



## **ABSTRAK**

Preferensi Siswa dalam Memilih Industri Jasa Keuangan  
(Studi Pada Kegiatan Sosialisasi Otoritas Jasa Keuangan di SMA Negeri 7 Kota  
Bengkulu)  
oleh Resti Melinda Sari, NIM 1516140294

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana preferensi siswa dalam memilih industri jasa keuangan setelah adanya sosialisasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Penelitian ini fokus pada siswa yang telah mendapatkan sosialisasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang Mengenal Industri Jasa Keuangan dan narasumber pada penelitian ini adalah siswa-siswi SMA Negeri 7 Kota Bengkulu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebelum adanya sosialisasi dari Otoritas Jasa Keuangan tentang Industri Jasa Keuangan mayoritas siswa SMA Negeri 7 Kota Bengkulu belum mengetahui tentang industri jasa keuangan. Setelah sosialisasi pun mereka hanya mengetahui gambaran umumnya saja dari industri jasa keuangan tersebut. Preferensi siswa dalam memilih industri jasa keuangan adalah berdasarkan kenyamanan dan keamanan bertransaksi di industri tersebut dan dengan adanya sosialisasi ini juga membantu mereka dalam memahami dan memilih jasa keuangan mana yang akan mereka pilih untuk bertransaksi serta menggunakan jasa-jasa keuangan.

*Kata Kunci :Preferensi, Industri Jasa Keuangan*

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Preferensi Siswa dalam Memilih Industri Jasa Keuangan (Studi Pada Kegiatan Sosialisasi Otoritas Jasa Keuangan di SMA Negeri 7 Kota Bengkulu)”. Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, dengan demikian penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H, selaku Rektor IAIN Bengkulu yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di IAIN Bengkulu.
2. Dr. Asnaini, MA, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Desi Isnaini, MA selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan saran saat pengajuan judul skripsi.
4. Dr. Nurul Hak, M.A selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, semangat, arahan dan motivasi selama bimbingan skripsi dengan kesabaran dan keikhlasan.
5. Yosy Arisandy, M.M, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, semangat, arahan dan motivasi selama bimbingan skripsi dengan kesabaran dan keikhlasan.

6. Kedua orang tuaku yang telah mencurahkan kasih sayang tiada batas tanpa mengenal lelah dan selalu memberi dukungan.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, 17 Desember 2019 M  
Rabi'ul-Akhir 1441 H

Resti Melinda Sari  
NIM 1516140294

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GRAFIK.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan Masalah.....	6
E. Kegunaan Penelitian.....	6
F. Penelitian Terdahulu .....	7
G. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	10
2. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	12
3. Subjek atau informan penelitian.....	12
4. Sumber dan teknik pengumpulan data .....	12
5. Teknik analisis data.....	15
H. Sistematika Penulisan .....	16

### BAB II KAJIAN TEORI

A. Teori Preferensi .....	18
1. Pengertian Preferensi .....	18
2. Faktor yang Mempengaruhi Preferensi .....	20
3. Preferensi dalam Perspektif Ekonomi Islam .....	25
B. Industri Jasa Keuangan .....	25
1. Industri Perbankan.....	25
a. Pengertian Bank dan Perbankan.....	26
b. Jenis Perbankan dan Perbedaan Fungsinya.....	27
2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) .....	28
3. Industri Pasar Modal .....	30
a. Pengertian Pasar Modal.....	30
b. Fungsi dan Karakteristiknya .....	32
4. BMT (Baitul Maal wat Tamwil) .....	33
a. Pengertian dan karakteristik Baitul Maal wat Tamwil (BMT) ...	33
b. Prinsip-Prinsip Dasar Operasional Baitul Maal wat Tamwil.....	36

5. Asuransi.....	38
a. Pengertian Asuransi .....	38
b. Prinsip-Prinsip Asuransi .....	39
6. Koperasi .....	41
a. Pengertian Koperasi .....	41
b. Fungsi dan Peran Koperasi .....	42
c. Prinsip Koperasi .....	43

### **BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) .....	44
1. Sejarah Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) .....	44
2. Visi Misi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) .....	46
3. Tujuan Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).....	48
4. Fungsi, Tugas Dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).....	49
5. Nilai-Nilai Strategi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) .....	52
6. Struktur Organisasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).....	53
B. Gambaran Umum SMA Negeri 7 Kota Bengkulu .....	54
1. Sejarah Singkat Sma Negeri 7 Kota Bengkulu .....	54
2. Visi dan Misi SMA Plus Negeri 7 Bengkulu .....	56

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Data Informan .....	57
B. Preferensi Siswa dalam Memilih Industri Jasa Keuangan Setelah Mendapatkan Sosialisasi dari Otoritas Jasa Keuangan .....	59
1. Instrumen Data Preferensi .....	59
2. Grafik Instrumen Data Preferensi .....	64
C. Pembahasan.....	64

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	68
B. Saran.....	68

### **DAFTAR PUSTAKA ..... 69**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 4.1. : Data informan penelitian.....	57
Tabel 4.2 : Instrumen data preferensi.....	59

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1 : Grafik Instrumen Data Preferensi.....	64
--	----

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Blanko Judul

Lampiran 2 : Bukti Menghadiri Seminar

Lampiran 3 : Daftar Hadir Seminar Proposal

Lampiran 4 : Surat Keterangan Perubahan Judul

Lampiran 5 : Halaman Pengesahan Proposal

Lampiran 6 : Surat SK Pembimbing Skripsi

Lampiran 7 : Halaman Pengesahan Izin Penelitian

Lampiran 8 : Pedoman Wawancara

Lampiran 9 : Surat Izin Penelitian

Lampiran 10 : Surat Keterangan Selesai Penelitian

Lampiran 11 : Lembar Bimbingan Skripsi

Lampiran 12 : *Check Plagiarisme* Judul

Lampiran 13 : Lembar Dokumentasi Penelitian



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Lembaga keuangan merupakan suatu perusahaan yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan, artinya segala kegiatan yang dilakukan oleh lembaga ini akan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, penghimpunan dana, menyalurkan, dan/atau jasa-jasa keuangan lainnya.<sup>1</sup> Pertumbuhan perekonomian yang pesat tidak dapat dilepaskan dari perkembangan sistem keuangan yang semakin canggih. Terjadinya proses globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan dibidang teknologi informasi serta inovasi finansial telah menciptakan sistem keuangan yang semakin kompleks, dinamis, dan saling terkait antar-subsektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan.<sup>2</sup>

Regulasi dan supervisi sektor keuangan yang kuat merupakan faktor yang sangat krusial dalam rangka mengimbangi perkembangan sektor keuangan tersebut. Sektor keuangan merupakan sentrum dalam sebuah sistem perekonomian, sehingga kegagalan dalam mengelola sektor keuangan dapat melemahkan kinerja seluruh sistem perekonomian. Regulasi dan pengawasan sektor keuangan juga menempati posisi penting dalam rangka mengantisipasi potensi

---

<sup>1</sup> Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah: Berbasis PSAK Syariah*, Eds. Kedua, Cet. 1, (Jakarta: PT. Indeks, 2017), h. 40

<sup>2</sup> Rio Satria, *Masa Depan Industri Keuangan Syariah Dalam Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan*, h. 10

pelanggaran yang mungkin saja dilakukan oleh lembaga keuangan. Inovasi yang dilakukan seringkali berpotensi melanggar ketentuan yang berlaku karena desakan kompetisi yang begitu ketat.<sup>3</sup>

Kewenangan OJK di bidang pengaturan diperlukan dalam mengimplementasikan berbagai ketentuan baik yang diatur dalam UU OJK maupun UU Sektor Jasa Keuangan Lainnya, sedangkan dalam melaksanakan tugas pengawasan, OJK mempunyai beberapa wewenang antara lain melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain.

Sebelumnya pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan di Indonesia dilakukan oleh Bank Indonesia (BI), dan badan Pengawas Pasar Modal Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). BI mengatur dan mengawasi sektor perbankan sedangkan Bapepam-LK mengatur dan mengawasi Pasar Modal dan Jasa keuangan lainnya. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU nomor 21 tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK didirikan untuk menggantikan peran Bapepam-LK.<sup>4</sup>

Terbentuknya OJK, membuat kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh Bank Indonesia (BI) dan Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) akan berpindah kepada OJK. BI

---

<sup>3</sup> Rio Satria, *Masa...*, h.11

<sup>4</sup>Hesty D. Lestari, "Otoritas Jasa Keuangan : Sistem Baru Dalam Pengaturan dan Pengawasan Sektor Jasa Keuangan", *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 12, Nomor 3, 2012, h.557

akan lebih bertanggung jawab dalam menangani masalah makro (*macro-prudential supervision*) yang fokus pada kestabilan sistem keuangan dengan cara memitigasi risiko sistemik, dan OJK berwenang dalam menangani masalah mikro (*micro-prudential supervision*) yang fokus pada kesehatan institusi perbankan secara individual. Peran Bapepam-LK terhadap pengaturan dan pengawasan Pasar Modal dan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) akan dialihkan ke OJK. Oleh sebab itu, beberapa lembaga yang akan berada di bawah pengawasan OJK adalah perbankan, pasar modal, lembaga asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.<sup>5</sup>

OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

1. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
3. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

1. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;
2. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan
3. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Agus Anita Sari, “Analisis peran otoritas jasa keuangan dalam mengawasi investasi di provinsi lampung dalam persepekti ekonomi islam”, (Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2018)

<sup>6</sup>Musliar Kasim, *Mengenal Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan*, (Jakarta : Dewan Komisioner OJK, 2014), h. 14

OJK selain berfungsi mengawasi dan mengatur sektor jasa keuangan juga berfungsi sebagai lembaga yang memberikan perlindungan kepada masyarakat, serta juga memberi edukasi kepada masyarakat terkait seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan. Maka, hal ini lah yang membedakan pengawasan sebelumnya dengan pengawasan di bawah OJK. Perlindungan dan edukasi yang dimaksud diarahkan dengan tujuan, meningkatkan kepercayaan dari investor dan konsumen dalam setiap aktivitas dan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan. Kemudian memberikan peluang dan kesempatan untuk perkembangan sektor jasa keuangan secara adil, efisien, dan transparan.<sup>7</sup>

Perlindungan konsumen yang dimaksud oleh OJK bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan konsumen, dan menumbuhkan kesadaran pelaku usaha jasa keuangan mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan.<sup>8</sup>

Dari pernyataan diatas dapat dipahami bahwa peran OJK adalah mengawasi, mengatur, dan melindungi. Peran OJK tersebut sangat berpengaruh terhadap sektor jasa keuangan, namun dibalik itu semua juga sangat berpengaruh dan membantu masyarakat dalam permasalahan yang ditemukan pada sektor jasa keuangan. Karena, permasalahan yang

---

<sup>7</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan Edisi Ke 2*,(Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2015),h. 53

<sup>8</sup>POJK Nomor : 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/regulasi/peraturan-ojk/Pages/POJK-Perlindungan-Konsumen.aspx> diakses pada 30 November 2019, pukul 11.00 WIB

dialami oleh masyarakat dapat di tindak lanjuti oleh OJK berdasarkan ketentuan-ketentuan dari peran OJK itu sendiri.

Kehadiran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dinilai sangat bermanfaat dalam menjaga stabilitas industri jasa keuangan. Oleh sebab itu, diharapkan periode Dewan Komisioner OJK selanjutnya dapat menjaga industri keuangan tetap stabil di tengah kondisi ekonomi global yang bergejolak. Tantangan OJK ke depan adalah bagaimana mendorong lebih banyak orang Indonesia yang melek (terlibat) dalam industri keuangan. Untuk itu OJK harus lebih mengintensifkan edukasi, komunikasi serta sosialisasi.<sup>9</sup>

Dari sisi edukasi dan sosialisasi, OJK telah melakukan upaya untuk meningkatkan literasi keuangan dengan mendorong perbankan ikut serta dalam program Laku Pandai. Dengan upaya meningkatkan literasi keuangan ke berbagai daerah diharapkan makin banyak orang yang bertransaksi melalui bank. Upaya dalam membuat masyarakat melek keuangan bukanlah hanya tanggung jawab OJK tetapi juga seluruh pihak. Untuk itu OJK melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat minimal lingkungan terdekat.

Berdasarkan uraian di atas penulis bermaksud untuk meninjau lebih dalam tentang Preferensi Siswa Dalam Memilih Industri Jasa Keuangan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti dengan judul “**Preferensi**

---

<sup>9</sup> Edukasi dan Sosialisasi Masih Jadi Tantangan OJK Kedepan, <http://infobanknews.com/edukasi-dan-sosialisasi-masih-jadi-tantangan-ojk-kedepan/>, di akses pada hari Sabtu 30 November 2019, Pukul 10.26

**Siswa Dalam Memilih Industri Jasa Keuangan (Studi Pada Kegiatan Sosialisasi Otoritas Jasa Keuangan di SMA Negeri 7 Kota Bengkulu)”.**

#### **B. Batasan Masalah**

Adapun batasan masalah penelitian ini adalah siswa SMA Negeri 7 Kota Bengkulu yang telah mendapatkan sosialisasi tentang Industri Jasa Keuangan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bengkulu.

#### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah penulis buat, maka masalah yang akan diteliti adalah bagaimana preferensi siswa dalam memilih industri jasa keuangan setelah adanya sosialisasi dari Otoritas Jasa Keuangan?

#### **D. Tujuan Masalah**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis buat, maka tujuan yang akan diteliti adalah untuk mengetahui preferensi siswa dalam memilih industri jasa keuangan setelah adanya sosialisasi dari Otoritas Jasa Keuangan.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Berharap dijadikan sumber informasi bagi akademisi sebagai tuntunan untuk penelitian yang serupa pada masa akan datang, serta dapat memperluas wawasan ilmiah mengenai pentingnya industri jasa keuangan.

## 2. Kegunaan Praktis

### a. Bagi penulis

1. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai preferensi siswa dalam memilih industri jasa keuangan setelah adanya sosialisasi.
2. Untuk melengkapi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana pada jurusan ekonomi islam program studi perbankan syariah.

### b. Bagi Pembaca

Dapat digunakan sebagai bahan rujukan yang akan penelitian selanjutnya, sehingga akan saling melengkapi antara penelitian sebelumnya dan penelitian selanjutnya dan dapat mengetahui bagaimana pilihan atau kesukaan masyarakat terhadap industri jasa keuangan.

## **F. Penelitian Terdahulu**

1. Ermawati dan Irham Pakawaru, yang bertujuan untuk mengetahui strategi promosi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tengah dalam edukasi dan perlindungan konsumen di kota palu. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif untuk meng-*explore* strategi promosi yang dilakukan OJK Provinsi Sulawesi Tengah. Kehadiran OJK menjadi titik balik terhadap banyaknya permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan, yang meliputi tindakan *moral hazard*, belum optimalnya

perlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem keuangan. OJK sebagai lembaga independen membutuhkan upaya maksimal promosi tentang tugas dan fungsinya kepada masyarakat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif untuk meng-*explore* strategi promosi yang dilakukan OJK Provinsi Sulawesi Tengah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, strategi promosi yang dilakukan oleh OJK Provinsi Sulawesi Tengah adalah melalui Iklan di media cetak maupun elektronik.<sup>10</sup> Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang diteliti penulis karena terfokus pada strategi promosi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tengah dalam edukasi dan perlindungan konsumen di kota palu sedangkan penulis terokus pada preferensi siswa dalam memilih industri jasa keuangan (Studi Pada Kegiatan Sosialisasi Otoritas Jasa Keuangan di SMA Negeri 7 Kota Bengkulu).

2. Junaidi, penelitian ini bertujuan menganalisis persepsi masyarakat dan nasabah terhadap bank syariah di Kota Palopo. Teknik pengumpulan data didapat melalui kuesioner. Hasil analisis deskripsi yang dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa faktor penentu masyarakat muslim untuk memilih bank syariah adalah religiusitas dan pemahaman. Sedangkan pelayanan dan fasilitas tidak mempengaruhi keputusan masyarakat dalam arti bahwa aspek ini

---

<sup>10</sup>Ermawati dan irham pakawaru, “*strategi promosi otoritas jasa keuangan (ojk) provinsi sulawesi tengah dalam edukasi dan perlindungan konsumen di kota palu*”, Dose fakultas syariah dan ekonomi islam IAIN Palu



kurang mendukung responden untuk menjadinasabah atau memilih bank syariah.<sup>11</sup> Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang peneliti tulis karena penelitian ini terfokus pada Persepsi Masyarakat Untuk Memilih Dan Tidak Memilih Bank Syariah sedangkan penulis memfokuskan pada pembahasan Preferensi Siswa dalam Memilih Industri Jasa Keuangan Setelah Mendapatkan Sosialisasi dari Otoritas Jasa Keuangan.

3. Amin Hidayat, yang bertujuan untuk menganalisa peran ojk (otoritas jasa keuangan) dalam meningkatkan literasi keuangan pada masyarakat terhadap lembaga jasa keuangan. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian dengan mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah. Data diperoleh dari wawancara penelitian seperti kantor OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Sedangkan dalam pengumpulan data dengan observasi tidak langsung, wawancara tidak langsung, dokumentasi. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dalam Meningkatkan Literasi Keuangan pada Masyarakat terhadap Lembaga Jasa Keuangan sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan program strategi nasional literasi

---

<sup>11</sup> Junaidi, "Persepsi Masyarakat Untuk Memilih Dan Tidak Memilih Bank Syariah (Studi Kota Palopo)", Jurnal Fokus Bisnis, Volume 14, No 02, bulan Desember 2015

keuangan yang dilakukan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dengan menggunakan 3 pilar dimana ketiga pilar tersebut merupakan kerangka dasar untuk mewujudkan masyarakat yang well literate, adapun ketiga pilar tersebut adalah, yaitu: *pertama*, pilar edukasi dan kampanye nasional literasi keuangan, *kedua*, penguatan infrastruktur literasi keuangan, *ketiga*, pengembangan produk dan jasa keuangan.<sup>12</sup> Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang peneliti tulis karena penelitian ini terfokus pada Peran OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Pada Masyarakat Terhadap Lembaga Jasa Keuangan (Studi di Kantor Ojk Purwokerto) sedangkan penulis memfokuskan pada pembahasan Preferensi Siswa dalam Memilih Industri Jasa Keuangan Setelah Mendapatkan Sosialisasi dari Otoritas Jasa Keuangan.

## **G. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis dan pendekatan penelitian**

#### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu bentuk penelitian yang bertujuan mengungkapkan makna yang diberikan oleh anggota masyarakat pada perilakunya dan kenyataan

---

<sup>12</sup> Amin Hidayat, “*Peran OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Pada Masyarakat Terhadap Lembaga Jasa Keuangan (Studi di Kantor Ojk Purwokerto)*”, skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2017

sekitar.<sup>13</sup> Dan juga peneliti menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), karena data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian ini berasal dari kepustakaan baik berupa buku, ensklopedia, kamus, jurnal, dokumen, majalah dan lain sebagainya.<sup>14</sup>

## 2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan *deskriptif kualitatif*, penelitian ini sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data *deskriptif* berupa kata-kata tertulis atau lisan dalam bentuk tindakan kebijakan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana preferensi siswa dalam memilih industri jasa keuangan setelah adanya sosialisasi. Dimana peneliti akan melihat kualifikasi kesukaan masyarakat/siswa untuk menggunakan industri jasa keuangan.<sup>15</sup> Jadi, disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami kondisi pada suatu lingkungan tertentu yang biasanya menggunakan analisis pada risetnya.

---

<sup>13</sup> Salmon Priaji Martana, “*Problematika penerapan Metode Field Research Untuk Penelitian Arsitektur Vernakular di Indonesia*”, Jurnal Dimensi Teknik Arsitektur, Volume 3, Nomor 1, 2006, h.59

<sup>14</sup>Nursapia Harahap, “*Penelitian Kepustakaan*”, Jurnal Iqra’, Volume 08, Nomor 01, (Mei 2014), h.68

<sup>15</sup>Subandi, “*Deskripsi Kualitatif Sebagai Suatu Metode Dalam Penelitian Pertunjukan*”, Jurnal Harmonia, Volume 11, Nomor 2, (Desember 2011), h.176

## **2. Waktu dan lokasi penelitian**

### **1. Waktu penelitian**

Penelitian ini dilakukam dari bulan Juli 2019 sampai dengan Januari 2020.

### **2. Lokasi penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada siswa yang telah mendapatkan sosialisasi tentang Industri Jasa Keuangan yang di lakukan oleh OJK dan dalam penelitian ini peneliti mendapatkan lokasi di SMA Negeri 7 Kota Bengkulu.

## **3. Subjek atau informan penelitian**

Dalam penelitian kualitatif, istilah subjek penelitian disebut sebagai informan, yaitu pelaku memahami objek penelitian. Jadi informan dalam penelitian ini membutuhkan teknik *purposive sampling* yaitu tidak didasarkan perwakilan, namun berdasarkan kedalaman informasi yang dibutuhkan dengan informan kunci yang kemudian dikembangkan dengan informan lainnya dan mencari informasi sebanyak-banyaknya yang berhubungan dengan masalah penelitian.<sup>16</sup> Dengan demikian informan dalam penelitian ini adalah 28 orang siswa/siswi SMA Negeri 7 Kota Bengkulu yang telah mendapatkan sosialisasi dari OJK.

---

<sup>16</sup> Subandi, “*Deskripsi*,..... h. 177

#### 4. Sumber dan teknik pengumpulan data

##### 1. Sumber data

###### a. Data primer

Data primer merupakan data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data atau berasal dari sumber data utama. Yaitu berwujud tindakan atas pengalaman dan kata-kata dari pihak yang terlibat dengan masalah yang diteliti secara langsung pada peserta sosialisasi.<sup>17</sup>

###### b. Data sekunder

Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.<sup>18</sup>

##### 2. Teknis pengumpulan data

###### a. Observasi

Metode observasi dilakukan dengan cara mengamati perilaku, kejadian atau kegiatan orang atau sekelompok orang yang diteliti kemudian mencatat hasil pengamatan tersebut untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi.

---

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Ed.Rev, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 225

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metode,.....*, h. 225

Jadi observasi dalam penelitian ini dengan langsung melakukan pengamatan dilapangan.<sup>19</sup>

b. Wawancara

Suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan. Menggunakan tanya jawab yang bisa langsung bertatap muka atau melalui media komunikasi. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini akan dilakukan secara mendalam dan tatap muka langsung kepada masyarakat.<sup>20</sup>

c. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen diartikan sebagai suatu catatan tertulis / gambar yang tersimpan tentang sesuatu yang sudah terjadi. Dokumen merupakan fakta dan data tersimpan dalam berbagai bahan yang berbentuk dokumentasi.<sup>21</sup>

d. Studi perpustakaan (*library research*)

Penelitian perpustakaan untuk mendapatkan data sekunder melalui pengumpulan dan penyelidikan data-

---

<sup>19</sup> Aunu Rofiq Djaelani, “Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif”, Jurnal FPTK, Volume XX, Nomor 1, (Maret 2013), h. 84.

<sup>20</sup> Aunu Rofiq Djaelani, “Teknik,.....”, h. 85

<sup>21</sup> Aunu Rofiq Djaelani, “Teknik ,.....”, h. 88

data pada kepustakaan khususnya yang berhubungan dengan pokok masalah yang diteliti.<sup>22</sup>

## 5. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang digunakan yaitu model *miles* dan *huberman* karena peneliti *kualitatif* ini melakukan pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam priode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, saat tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel.<sup>23</sup>

Sesuai dengan pendekatan yang digunakan maka analisis data dilakukan dengan teknik sebagai berikut:

- (1) *Data reduction* (reduksi data) : cara yang dilakukan peneliti dalam melakukan analisis untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga dapat menarik kesimpulan atau memperoleh pokok temuan. Proses berlangsung hingga laporan akhir selesai atau dengan kata lain bahwa data adalah proses seleksi, penafsiran, penyederhanaan dan abstraksi data kasar.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Nursapia Harahap, "*Penelitian,.....*", h. 68

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode....*, h. 246

<sup>24</sup> Subandi, "*Deskripsi....*", h.178

- (2) *Display data* (penyajian data) : setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. “dalam hal ini miles dan huberman (1984) menyatakan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.”<sup>25</sup>
- (3) *Verification* : langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut miles and huberman adalah penarikan kesimpulan dalam verifikasi. Dengan demikian kesimpulan dalam verifikasi. Maka kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang sudah dirumuskan sejak awal, akan tetapi mungkin juga tidak karena seperti setelah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian dilapangan.<sup>26</sup>

## **H. Sistematika Penulisan**

Untuk lebih memudahkan dan memahami isi dari skripsi ini secara keseluruhan, penulis membuat sistematika penulisan atau garis besar dari penulisan skripsi ini yang terbagi atas lima bab dengan masing-masing diuraikan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan merupakan bagian yang menjelaskan latar belakang masalah, batasan masalah, perumusan masalah yang diambil,

---

<sup>25</sup>Sugiyono, *Metode...*, h.249

<sup>26</sup>Sugiyono, *Metode...*, h. 252



tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metodologi penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II Kajian teori merupakan bagian yang menjelaskan teori yang berhubungan dengan penelitian berisi teori tentang preferensi, industri jasa keuangan.

BAB III Gambaran umum objek penelitian merupakan bagian yang menggambarkan/menjelaskan objek yang diteliti seperti: Otoritas Jasa Keuangan, SMA Negeri 7 Kota Bengkulu,

BAB IV Hasil dan pembahasan merupakan bagian yang menjelaskan deskripsi objek penelitian, analisis data, dan pembahasan.

BAB V Penutup merupakan bagian terakhir dalam penelitian skripsi. Bagian ini memuat kesimpulan dan saran.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Teori Preferensi

##### 1. Pengertian Preferensi

Ada beberapa definisi preferensi yang di kemukakan oleh beberapa ahli. Abdul Rahman Shaleh dan Muhibb Abdul Wahab mendefinisikan: “preferensi itu dapat diartikan suatu kecenderungan untuk memberikan perhatian kepada orang dan bertindak terhadap orang. Aktifitas atau situasi yang menjadi objek dari minat tersebut dengan disertai dengan perasaan senang atau puas”.<sup>1</sup>

Sedangkan menurut Andi Mappiare definisi preferensi adalah :“suatu perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran dari perasaan, harapan, pendirian, prasangka, rasa takut atau kecenderungan lain yang mengarahkan individu kepada suatupilihan tertentu”.

Dalam kajian ekonomi, Ada empat prinsip pilihan rasional yaitu:<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Rifa'atul Machmudah, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Non Muslim Menjadi Nasabah Di Bank Syariah*, h. 24.

<sup>2</sup> Andi Mappiare, *Psikologi Orang Dewasa Bagi Penyesuaian Dan Pendidikan*, (Surabaya, Usana Offsetprinting, 1994), h . 62.

a. Kelengkapan ( *Completeness* )

Prinsip ini mengatakan bahwa setiap individu selalu dapat menentukan keadaan mana yang lebih disukainya diantara dua keadaan. Konsumen dapat membandingkan dan menilai semua produk yang ada. Bila A dan B ialah dua keadaan produk yang berbeda, maka individu selalu dapat menentukan secara tepat satu diantara kemungkinan yang ada. Dengan kata lain, untuk setiap dua jenis produk A dan B, konsumen akan lebih suka A dari pada B, lebih suka B daripada A, suka akan kedua-duanya, atau tidak suka akan kedua-duanya. Preferensi ini mengabaikan faktor biaya dalam mendapatkannya.

b. Transivitas ( *Transitivity* )

Prinsip ini, menerangkan mengenai konsistensi seseorang dalam menentukan dan memutuskan pilihannya bila dihadapkan oleh beberapa alternatif pilihan produk. Dimana jika seorang individu mengatakan bahwa “produk A lebih disukai dari pada produk B” dan “produk B lebih disukai daripada produk C”, maka ia pasti akan mengatakan bahwa “produk A lebih disukai daripada produk C”. Prinsip ini sebenarnya untuk memastikan adanya konsistensi internal di dalam diri individu dalam hal pengambil keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa pada setiap alternatif pilihan seorang individu akan selalu konsisten dalam memutuskan

preferensinya atas suatu produk dibandingkan dengan produk lain.

c. Kontinuitas (*Continuity*)

Prinsip ini menjelaskan bahwa jika seorang individu mengatakan “produk A lebih disukai daripada produk B”, maka setiap keadaan yang mendekati produk A pasti juga akan lebih disukai daripada produk B. Jadi ada suatu kekonsistenan seorang konsumen dalam memilih suatu produk yang akan dikonsumsinya.

d. Lebih Banyak Lebih Baik (*The More Is The Better*)

Prinsip ini menjelaskan bahwa jumlah kepuasan akan meningkat, jika individu mengonsumsi lebih banyak barang atau produk tersebut. Sehingga konsumen cenderung akan selalu menambah konsumsinya demi kepuasan yang akan didapat.

## 2. Faktor yang Mempengaruhi Preferensi

Menurut Nugroho J. Setiadi, preferensi terhadap barang dan jasa dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu:<sup>3</sup>

a. Faktor-faktor kebudayaan

1. Kebudayaan, Kebudayaan merupakan faktor penentu yang paling dasar dari keinginan dan perilaku seseorang. Bila makhluk-makhluk lainnya bertindak berdasarkan naluri,

---

<sup>3</sup> Nugroho, J. Setiadi, *Perilaku Konsumen*, Cet-Ke 5, (Jakarta: Kencana Prenada Meida Group, 2013), h. 10

maka perilaku manusia umumnya dipelajari. Seorang anak yang sedang tumbuh mendapatkan seperangkat nilai, persepsi, preferensi dan perilaku melalui suatu proses sosialisasi yang melibatkan keluarga dan lembaga-lembaga sosial penting lainnya. Seorang anak yang dibesarkan di Amerika akan terbuka dengan nilai-nilai: prestasi dan keberhasilan, kegiatan efisiensi dan kepraktisan, kemajuan, kenyamanan di luar, kemanusiaan dan jiwa muda.

2. Subbudaya, setiap kebudayaan terdiri dari subbudaya-subbudaya yang lebih kecil yang memberikan identifikasi dan sosialisasi yang lebih spesifik untuk para anggotanya. Subbudaya dapat dibedakan menjadi empat jenis: kelompok nasionalisme, kelompok keagamaan, kelompok ras, dan area geografis.
3. Kelas sosial, kelas-kelas sosial adalah kelompok yang relatif homogen dan bertahan lama dalam suatu masyarakat yang tersusun secara hierarki dan yang keanggotaannya mempunyai nilai, minat dan perilaku serupa.

b. Faktor-faktor sosial

1. Kelompok referensi, kelompok referensi seseorang terdiri dari seluruh kelompok yang mempunyai pengaruh

langsung maupun tidak langsung terhadap sikap atau perilaku seseorang. Beberapa di antaranya *kelompok primer*, yang dengan adanya interaksi yang cukup berkesinambungan, seperti: keluarga, teman, tetangga dan teman sejawat. *Kelompok sekunder*, yang cenderung lebih resmi dan yang mana interaksi yang terjadi kurang berkesinambungan. Kelompok yang seseorang ingin menjadi anggotanya disebut kelompok aspirasi. Sebuah kelompok diasosiatif (memisahkan diri) adalah sebuah kelompok yang dinilai atau perilakunya tidak disukai oleh individu.

2. Keluarga, kita dapat membedakan dua keluarga dalam kehidupan pembeli, yang pertama ialah *Keluarga orientasi*, yang merupakan orang tua seseorang. Dari orang tualah seseorang mendapatkan pandangan tentang agama, politik, ekonomi dan merasakan ambisi pribadi nilai atau harga diri dan cinta. *Keluarga prokreasi*, yaitu pasangan hidup anak-anak seseorang keluarga merupakan organisasi pembeli yang konsumen yang paling penting dalam suatu masyarakat dan telah diteliti secara intensif.
3. Peran dan Status, seseorang umumnya berpartisipasi dalam kelompok selama hidupnya keluarga, klub,

organisasi. Posisi seseorang dalam setiap kelompok dapat diidentifikasi dalam peran dan status.

c. Faktor Pribadi

1. Umur dan tahapan dalam siklus hidup, konsumsi seseorang juga dibentuk oleh tahapan siklus hidup keluarga. Beberapa penelitian terakhir telah mengidentifikasi tahapan-tahapan dalam siklus hidup psikologis. Orang-orang dewasa biasanya mengalami perubahan atau transformasi tertentu pada saat mereka menjalani hidupnya.
2. Pekerjaan, para pemasar berusaha mengidentifikasi kelompok-kelompok pekerja yang memiliki minat di atas rata-rata, terhadap produk dan jasa tertentu.
3. Gaya hidup, gaya hidup seseorang adalah pola hidup di dunia yang di ekspresikan oleh kegiatannya, minat dan pendapat seseorang. Gaya hidup menggambarkan “seseorang secara keseluruhan” yang berinteraksi dengan lingkungan. Gaya hidup juga mencerminkan sesuatu dibalik kelas sosial seseorang.
4. Kepribadian dan konsep diri, yang dimaksud dengan kepribadian adalah karakteristik psikologis yang berbeda dan setiap orang yang memandang responnya terhadap lingkungan yang relatif konsisten.

#### d. Faktor-Faktor Psikologis

1. Motivasi, Motivasi berasal dari bahasa latin *movere* yang artinya menggerakkan. Seorang konsumen tergerak membeli suatu produk karena ada sesuatu yang menggerakkan. Proses timbulnya dorongan sehingga konsumen tergerak membeli suatu produk itulah yang disebut motivasi. Sedangkan yang memotivasi untuk membeli namanya motif.
2. Persepsi, persepsi didefinisikan sebagai proses di mana seseorang memilih, mengorganisasikan, mengartikan, masukan informasi, untuk menciptakan suatu gambaran yang berarti dari dunia ini.
3. Proses belajar, proses belajar menjelaskan perubahan dalam perilaku seseorang yang timbul dari pengalaman.
4. Kepercayaan dan sikap, kepercayaan adalah suatu gagasan deskriptif yang dimiliki seseorang terhadap sesuatu.

### 3. Preferensi dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dalam Islam empat prinsip pilihan rasional belum cukup, sebab masih ada prinsip yang harus diperbaiki dan ada beberapa penambahan yakni:<sup>4</sup>

- a. Objek barang dan jasa tersebut harus halal dan toyib.

---

<sup>4</sup> Madnasir dan Khoirudin, "*Etika Bisnis Dalam Islam*", Seksi Penerbitan Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2012, h. 85



- b. Kemanfaatan atau kegunaan barang dan jasa yang dikonsumsi, artinya lebih memberikan manfaat dan jauh dari merugikan baik dirinya maupun orang lain.
- c. Kuantitas barang dan jasa yang dikonsumsi tidak berlebihan dan tidak terlalu sedikit atau kikir, tetapi pertengahan.

Preferensi dalam Islam dikaji di mana seseorang dalam menggunakan kekayaan harus berhati-hati, yang terpenting dalam hal ini adalah cara penggunaan yang harus diarahkan pada pilihan-pilihan (preferensi) yang mengandung *maslahah* (baik dan manfaat). Agar kekayaan atau harta tersebut dapat memberikan manfaat untuk kesejahteraan bagi individu tersebut. Preferensi memiliki arti pilihan atau kecenderungan individu dalam memilih produk dan jasa, yang berarti kebebasan individu dalam memilih. Islam menganggap kebebasan adalah sebagai fondasi dari nilai-nilai kemanusiaan dan kemuliaan manusia.

## **B. Industri Jasa Keuangan**

Industri Jasa Keuangan (IJK) adalah kumpulan perusahaan/institusi dan lembaga pendukungnya yang berusaha di bidang jasa keuangan. Jenis Industri Jasa Keuangan yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan meliputi; industri perbankan, industri pasar modal dan

industry keuangan non bank yang terdiri dari Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan dan Pegadaian.<sup>5</sup>

## **1. Industri Perbankan**

### **1) Pengertian Bank dan Perbankan**

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan pada bab 1 dan pasal 1 serta ayat 2 dijelaskan bahwa, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit ataupun bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Adapun pada ayat 1 dijelaskan tentang definisi perbankan, perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Rumusan tentang perbankan yang lain dapat kita temui dalam kamus istilah hukum fockema andreae yang mengatakan bahwa bank adalah suatu lembaga atau orang pribadi yang menjalankan perusahaan dalam menerima dan memberikan uang dari dan kepada pihak ke tiga. Berhubung dengan adanya cek yang hanya dapat diberikan kepada banker sebagai tertarik, maka bank dalam arti luas adalah orang atau lembaga yang

---

<sup>5</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Mengenal Otoritas Jasa Keuangan Dan Industri Jasa Keuangan*, (Jakarta, 2014)

dalam pekerjaannya secara teratur menyediakan uang untuk pihak ketiga.<sup>6</sup>

## 2) Jenis Perbankan dan Perbedaan Fungsinya

Jika kita melihat undang-undang pokok tentang perbankan No. 14 Tahun 1967 maka jenis bank itu ada banyak sekali jenisnya. Namun setelah keluarnya undang-undang pokok perbankan No. 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 maka jenis perbankan terdiri dari:

### a. Bank Umum

Dengan perkembangan zaman yang begitu cepat telah membentuk pola pikir masyarakat untuk memilih lembaga keuangan yang sesuai dengan pilihan dan kenyamanan. Umat islam sebagai umat yang memegang teguh ajaran islam menginginkan adanya lembaga keuangan yang berasaskan kepada nilai-nilai islam, sehingga keputusan mendirikan lembaga keuangan syariah juga bagian dari keinginan menjawab pertanyaan tersebut. Dengan demikian bank umum terbagi menjadi bank konvensional dan bank syariah.

---

<sup>6</sup> Irham Fahmi, *Manajemen Perbankan Konvensional Dan Syariah*, Edisi Pertama, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), h. 11-12

Ada perbedaan pandangan yang begitu jelas dalam memahami persoalan perbankan konvensional dan perbankan syariah yaitu pada persoalan bunga (interest). Perbankan konvensional diperkenalkan oleh dunia Barat yang berpaham pada sistem ekonomi kapitalis dan perbankan syariah diperkenalkan oleh negara-negara Timur Tengah yang berpahaman pada hukum islam.

Memang para pakar ekonomi telah memiliki pandangan yang berbeda dalam melihat bank konvensional dan syariah ini. Perbedaan pandangan tersebut mengharapakan agar krisis moneter yang pernah terjadi tidak terulang kembali dan saat ini memang harus diakui jika bank syariah dianggap sebagai solusi alternatif dalam menghindari berbagai pertanyaan yang menganggap perbankan konvensional tidak tepat atau memiliki kelemahan.<sup>7</sup>

## **2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)**

Pemahaman dan penafsiran tentang bank perkreditan rakyat dapat kita lihat pada undang-undang no. 7 tahun 1992 pasal 13 yang selanjutnya telah di ubah dengan undang-undang no. 10 tahun 1998. Dimana pada pasal 13 isinya adalah:

---

<sup>7</sup> Irham Fahmi, *Manajemen*,..., h. 18-19

Usaha bank perkreditan rakyat meliputi:

- a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu
- b) Memberikan kredit
- c) Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan bank indonesia
- d) Menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat bank indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan tabungan pada bank lain.

Selanjutnya kegiatan yang dilarang bagi Bank Perkreditan Rakyat seperti yang termuat dalam Pasal 14 Undang-undang No. 7/92 setelah diubah dengan Undang-undang No. 10/98 yaitu:<sup>8</sup>

- a) Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran
- b) Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing
- c) Melakukan penyertaan modal
- d) Melakukan usaha perasuransian
- e) Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 13

---

<sup>8</sup> Irham Fahmi, *Manajemen*,..., h. 18

Dengan kata lain beberapa bank yang dahulunya ada banyak jenisnya tersebut melebur kepada dua bentuk bank tersebut. Pelabuhan dari banyak bentuk bank dan hanya menjadi dua bentuk itu saja, diharapkan terjadi pembentukan manajemen pengelolaan perbankan yang lebih sederhana dan juga lebih efisien, termasuk mudahkan bagi pihak konsumen dalam menentukan pilihan secara lebih cepat dan tepat.<sup>9</sup>

### **3. Industri Pasar Modal**

#### **1) Pengertian Pasar Modal**

Pasar Modal menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Pasal 1 Ayat 12 adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal dikenal juga dengan nama bursa efek. bursa efek menurut pasal 1 ayat 4 UU No. 8 Tahun 1995 tentang pasar modal adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Medan, 2009), h. 55

<sup>10</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan Edisi Ke 2*, (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2015), h. 186

Sedangkan menurut beberapa ahli yang dimaksud dengan pasar modal adalah:

- a. Tjipto Darmadji, dkk adalah pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan baik dalam bentuk utang ataupun modal sendiri.
- b. Y. Sri Susilo, dkk, pasar modal adalah pasar keuangan untuk dana-dana jangka panjang dan merupakan pasar yang kongkret.
- c. John Downes dan Jordan Elliot Goodman, pasar modal adalah pasar dimana dana modal (utang dan ekuitas) diperdagangkan. didalamnya termasuk penempatan pribadi sumber-sumber utang dan ekuitas dan juga pasar-pasar dan bursa-bursa terorganisasi.<sup>11</sup>

Dengan demikian, pasar modal secara umum merupakan suatu tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal. Sedangkan Pasar Modal syariah adalah pasar yang seluruh mekanisme kegiatannya terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangannya telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

---

<sup>11</sup> Andri Soemitra, *Bank dan ....*, h. 110-111

## 2) Fungsi dan Karakteristiknya

Pasar modal berperan menjalankan dua fungsi secara simultan berupa fungsi ekonomi dengan mewujudkan pertemuan dua kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana dan fungsi keuangan dengan memberikan kemungkinan dan kesempatan untuk memperoleh imbalan bagi pemilik dana melalui investasi.

Pasar modal juga mampu menjadi tolak ukur kemajuan perekonomian suatu negara. Pasar modal memungkinkan percepatan pertumbuhan ekonomi dengan memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk dapat memanfaatkan dana langsung dari masyarakat tanpa harus menunggu tersedianya dana dari operasi perusahaan. Ada beberapa manfaat pasar modal, yaitu:<sup>12</sup>

- a. menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha sekaligus memungkinkan alokasi sumber dana secara optimal.
- b. memberikan wahana investasi bagi investor sekaligus memungkinkan upaya diversifikasi.
- c. menyediakan *leading indicator* bagi tren ekonomi suatu negara.

---

<sup>12</sup> Andri Soemitra, *Bank dan ....*, h. 112



- d. penyebaran kepemilikan perusahaan sampai lapisan masyarakat menengah.
- e. penyebaran kepemilikan, keterbukaan dan profesionalisme, menciptakan iklim berusaha yang sehat.
- f. menciptakan lapangan kerja/profesi yang menarik.
- g. memberikan kesempatan memiliki perusahaan yang sehat dan mempunyai proyek.<sup>13</sup>

#### **4. BMT (Baitul Maal wat Tamwil)**

##### **1) Pengertian dan karakteristik Baitul Maal wat Tamwil (BMT)**

Kata Baitul Maal wat Tamwil berasal dari bahasa Arab yaitu baitul maal dan baitul tamwil. Baitul artinya rumah, maal berarti harta atau kekayaan. Jadi baitul maal artinya rumah harta atau rumah kekayaan. Sedangkan al tamwil berasal dari kata mawwala-yumawwilu, tamwilan yang artinya pengembangan harta, Baitul Maal wat Tamwil berarti rumah atau tempat harta dan pengembangan harta.<sup>14</sup>

Baitul Maal wat Tamwil merupakan lembaga keuangan yang dijalankan menurut syari'at Islam dengan usaha pokoknya menghimpun dana dan memberikan pembiayaan kepada usahausaha yang produktif dan menguntungkan. BMT merupakan gabungan dari kata baitul maal dan baitul tamwil.

---

<sup>13</sup> Andri Soemitra, *Bank dan ....*, h. 113

<sup>14</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (yogyakarta: Ekonisia UII 2003). h. 96

a. Baitul maal

Suatu lembaga keuangan yang kegiatannya lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti : zakat, infaq dan shodaqoh atau sumber lain yang halal.

b. Baitul tamwil

Suatu lembaga keuangan yang kegiatannya mengumpulkan dan menyalurkan dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi barang-barang yang tidak dapat terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syari'ah.<sup>15</sup>

Menurut Muhammad: “Baitul Maal wat Tamwil adalah lembaga pendukung peningkatan kualitas usaha ekonomi, pengusaha mikro dan pengusaha kecil bawah berlandaskan sistem syari'ah”. Atas landasan pengertian itu, maka BMT memiliki ciriciri utama sebagai berikut:

- a. Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan lingkungannya.

---

<sup>15</sup> Heri Sudarsono, *Bank,....*, h. 96

- b. Bukan lembaga sosial tetapi dimanfaatkan untuk mengefektifkan penggunaan zakat, infaq dan shodaqoh bagi kesejahteraan orang banyak.
- c. Ditumbuhkan orang banyak berlandaskan peran serta masyarakat di sekitarnya.
- d. Milik bersama masyarakat kecil menengah kebawah dari lingkungan BMT itu sendiri, bukan milik orang-seorang atau orang dari luar masyarakat itu.<sup>16</sup>

Selain ciri utama di atas, BMT juga memiliki ciri khas sebagai berikut:

- a. Sifat dan karyawan BMT bertindak aktif, dinamis, berpandangan produktif, tidak menunggu tetapi menjemput nasabah, baik sebagai penyeter dana maupun sebagai penerima pembiayaan usaha.
- b. Kantor dibuka dalam waktu tertentu dan ditunggu oleh sejumlah staf yang terbatas, karena sebagian besar staf harus bergerak di lapangan untuk mendapatkan nasabah penyeter dana, memonitor dan mengawasi usaha nasabah.
- c. Manajemen BMT diselenggarakan secara profesional dan Islami.

---

<sup>16</sup> Januari Djazuli, *Lembaga-lembaga Ummat sebuah pengenalan*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002), h. 184

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan pendukung peningkatan produktivitas dan kualitas usaha ekonomi, pengusaha mikro dan pengusaha kecil bawah dengan berlandaskan sistem syari'ah.<sup>17</sup>

## **2) Prinsip-Prinsip Dasar Operasional Baitul Maal wat Tamwil**

Lembaga keuangan syari'ah dengan sistem bagi hasil dirancang untuk terbinanya kebersamaan dalam menanggung resiko usaha dan berbagi hasil usaha antara pemilik dana yang menghimpun uangnya di lembaga-lembaga selaku pengelola dana dan masyarakat yang membutuhkan dana yang bisa berstatus peminjam dana atau pengelola usaha. Baitul Maal wat Tamwil (BMT) selaku pengelola dana harus dapat mengelola dana yang dipercayakan kepadanya dengan hati-hati dan memperoleh penghasilan yang maksimal.

Seperti halnya bank, BMT sebagai pemberi dana dapat melakukan penilaian permohonan pembiayaan akan memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon peminjam. Menurut Djazuli dan Januari prinsip-prinsip dasar operasional BMT adalah:

---

<sup>17</sup> Januari Djazuli, *Lembaga,.....*,h. 187

- a. Character. Penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon peminjam untuk memperkirakan kemungkinan bahwa peminjam dapat memenuhi kewajibannya.
- b. Capacity. Penilaian tentang kemampuan peminjam untuk melakukan pembayaran. Kemampuan diukur dengan catatan prestasi peminjam dimasa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas sarana usahanya, seperti karyawan, mesin, sarana produksi, cara usaha dan sebagainya.
- c. Capital. Penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon peminjam, diukur dengan posisi usaha atau perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh rasio keuangan dan penekanan pada komposisi modalnya.
- d. Colateral. Jaminan yang dimiliki calon peminjam. Penilaian untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu resiko kegagalan pembayaran terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajibannya.
- e. Conditions. Pihak BMT harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat dan secara spesifik melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon peminjam. Hal tersebut dilakukan karena kondisi

eksternal memiliki pengaruh yang cukup besar dalam proses berjalannya usaha calon peminjam dalam jangka panjang.<sup>18</sup>

## 5. Asuransi

### 1) Pengertian Asuransi

Istilah asuransi dalam perkembangannya di Indonesia berasal dari kata Belanda *assurantie* yang kemudian menjadi “asuransi” dalam bahasa Indonesia. Namun istilah *assurantie* itu sendiri sebenarnya bukanlah istilah asli bahasa Belanda akan tetapi, berasal dari bahasa Latin, yaitu *assecurare* yang berarti “meyakinkan orang”. Kata ini kemudian dikenal dalam bahasa Perancis sebagai *assurance*.<sup>19</sup>

Banyak pendapat mengenai pengertian asuransi, antara lain:

- a. Asuransi menurut Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan, yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yaitu timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang

---

<sup>18</sup>Janwari Djazuli, *Lembaga,.....*,h. 189

<sup>19</sup> Asnaini dan Herlina Yustati, *Lembaga Keuangan Syariah (Teori dan Praktiknya Di Indonesia)*. Cet I, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2017), h. 243

didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.

- b. Asuransi dalam sudut pandang ekonomi merupakan metode untuk mengurangi risiko dengan jalan memindahkan dan mengombinasikan ketidakpastian akan adanya kerugian keuangan. Menurut sudut pandang bisnis, asuransi adalah sebuah perusahaan yang usaha utamanya menerima/menjual jasa, pemindahan risiko dari pihak lain, dan memperoleh keuntungan dengan berbagai risiko di antara sejumlah nasabah.
- c. Sedangkan mengenai asuransi syariah, secara terminologi asuransi syariah adalah tentang tolong-menolong dan secara umum asuransi adalah sebagai salah satu cara untuk mengatasi terjadinya musibah dalam kehidupan, di mana manusia senantiasa dihadapkan pada kemungkinan bencana yang dapat menyebabkan hilangnya atau berkurangnya nilai ekonomi seseorang baik terhadap diri sendiri, keluarga, atau perusahaan yang diakibatkan oleh meninggal dunia, kecelakaan, sakit dan usia tua.<sup>20</sup>

## 2) Prinsip-Prinsip Asuransi

Prinsip-prinsip asuransi syariah yaitu antara lain sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> Andri Soemitra, *Bank dan ....*, h. 244-245

- a. Prinsip ikhtiar dan berserah diri; Manusia memiliki kewajiban untuk berusaha (ikhtiar) sesuai dengan kesanggupannya, tetapi pada saat yang bersamaan manusia juga harus berserah diri (tawakal) hanya kepada Allah Swt. Seringkali konsep yang salah adalah seseorang langsung berserah diri, tanpa pernah upaya untuk mengusahakan sesuatu. Tawakal hanya boleh dilakukan setelah kita melakukan ikhtiar.
- b. Prinsip tolong menolong (ta'awun); Bahwa setiap peserta asuransi ketika melangsungkan akad, harus memiliki niat untuk tolong menolong di antara atau dengan sesama peserta yang lain. Saling tolong atau tepatnya saling tanggung dalam konteks ini sangat dianjurkan dalam Islam.
- c. Prinsip bertanggung jawab; Para peserta asuransi setuju untuk saling bertanggung jawab antara satu sama lain, dan harus melaksanakan kewajiban di balik menerima yang menjadi haknya.
- d. Prinsip saling membantu dan bekerja sama; Salah satu keutamaan umat Islam untuk membantu sesamanya dalam berbuat kebajikan, antara lain tersimbolkan dalam konsep kehidupan berjamaah dan berukhuwah dalam konteksnya sangat luas.



e. Prinsip saling melindungi dari berbagai macam kesusahan; Para peserta asuransi syariah setuju untuk saling melindungi dari musibah, bencana, dan sebagainya terutama melalui penghimpunan dana tabarru' melalui perusahaan yang diberi kepercayaan untuk itu. Asas saling melindungi ini dijunjung tinggi dalam agama Islam.<sup>21</sup>

## **6. Koperasi**

### **1) Pengertian Koperasi**

Menurut Undang-undang RI No. 25 tahun 1992 Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 (UU RI No. 25 tahun 1992 Pasal 3). Untuk dapat mencapai tujuannya, pengelolaan koperasi harus dapat dilakukan dengan sebaik mungkin agar

---

<sup>21</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Pemasaran Strategik Pada Asuransi Syariah* (Bekasi: Gramata Publishing, 2015), h. 18-19

bisa diharapkan menjadi koperasi yang mampu bersaing dengan badan usaha lain, sehingga tujuan koperasi untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya akan tercapai.<sup>22</sup>

## 2) Fungsi dan Peran Koperasi

Menurut UU RI No. 25 tahun 1992 Pasal 4 menyatakan bahwa fungsi dan peran koperasi adalah:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b. Berperan serta aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Nurul Eka Mayasari, *Analisis Pengukuran Kinerja Koperasi (Studi Kasus Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Di Kabupaten Blora)*, Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang, 2009, h. 17

<sup>23</sup> Nurul Eka Mayasari, *Analisis,.....*, h. 18

### 3) Prinsip Koperasi

Menurut UU RI No. 25 tahun 1992 Pasal 5 Ayat 1, menyatakan bahwa koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut:

- a. Keanggotaan bersifat sukarela,
- b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis,
- c. Pembagian Sisa Hasil Usaha dilakukan secara adil,
- d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal,
- e. Kemandirian

24

---

<sup>24</sup> Nurul Eka Mayasari, *Analisis,.....*, h. 18

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**

##### **1. Sejarah Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**

Dalam mengawasi dunia perbankan yang sangat perlu dibentuknya suatu industri yang independen serta adil, pemerintah akhirnya membentuk suatu badan yang mengawasi seluruh aktivitas perbankan, pasar modal, BPRS serta dana pensiun yakni dalam mengawasi aktivitas tersebut dibentuklah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Latar belakang pembentukan OJK dikarenakan perlunya suatu lembaga pengawasan yang mampu berfungsi sebagai pengawas yang mempunyai otoritas terhadap seluruh lembaga keuangan, dimana lembaga pengawas tersebut bertanggung jawab terhadap kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank maupun lembaga keuangan non bank, sehingga tidak ada lagi lempar tanggung jawab terhadap pengawasannya. Selain itu, kegiatan usaha yang dilakukan berakibat semakin besarnya pengaturan penawasannya. Sehingga perlu adanya suatu alternatif untuk menjadikan pengaturan dan pengawasan maupun lembaga keuangan lainnya dalam satu atap.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Ed Kedua, (Jakarta : Kencana, 2012), h. 175-176

Sejalan dengan pengertian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana dijelaskan di dalam undang-undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut :

Pasal 1 undang-undang nomor 21 tahun 2011 menyebutkan: Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat dengan OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.<sup>2</sup>

Lebih lanjut dijelaskan mengenai tujuan terbantuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana dijelaskan pada UU No 21 Th 2011 sebagai berikut:

Pada tanggal 22 November 2012, pemerintah mensahkan UU NO. 21/2011 tentang otoritas jasa keuangan yang didirikan dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.<sup>3</sup>

Sejalan dengan pengawasan yang di lakukan di dunia perbankan dapat diketahui sebagai berikut:

---

<sup>2</sup>Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 *tentang Otoritas Jasa Keuangan*, Pasal 1

<sup>3</sup>Modul WPPE, *Mekanisme Perdagangan Efek Struktur Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: TICMI, 2016), h. 4

Sebelum adanya Otoritas Jasa Keuangan pengawasan industri keuangan berjalan terpisah dibawah dua leglator yaitu pengawasan dari Bank Indonesia yang mengawasi Perbankan Dan Bapepam-LK (Lembaga Keuangan) yang mengawasi pasar modal industri keuangan non-bank. Tugas dan pengawasan industri keuangan dan Bapepam-Lk ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 31 Desember 2013 dan Lembaga Keuangan Mikro pada tahun 2015.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masuk di Provinsi Bengkulu pada tanggal 1 Januari 2014. Pada saat itu OJK masih satu gedung dengan Bank Indonesia yang terletak di lantai dua Bank Indonesia, sudah berjalan kurang lebih 4 tahun, dalam pengawasan lembaga keuangan syariah di Bengkulu peralihan tugas dari Bank Indonesia. Sedangkan peresmian gedung Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bengkulu pada tanggal 04 April 2016 yang bertempat di Jl. Citundai, RT. 11/Rw. 02, Muara Dua Kota Bengkulu. Peresmian kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diresmikan langsung oleh Gubernur Ridwan Mukti.

## **2. Visi Misi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**

### **a. Visi**

“Menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan

menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.”

“Visi OJK yang sangat jelas itu menunjukkan pernyataan atau komitmen yang tegas mengenai tujuan organisasi yang tercakup nilai-nilai, cita-cita dan aspirasi yang akan diberikan, pelayanan yang akan ditawarkan, kebutuhan yang akan ditangani, dan kelompok target yang akan dilayani.”<sup>4</sup>

b. Misi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki misi sebagai berikut:

- a) Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel,
- b) Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil,
- c) Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.

Misi OJK tersebut merupakan alasan mendasar mengapa OJK ada dan sekaligus menjadi dasar komitmen OJK untuk

---

<sup>4</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan Edisi Ke 2*, (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2015), h. 2

memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh pemangku kepentingan *stakeholder*.<sup>5</sup>

### **3. Tujuan Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**

Pad pasal 4 UU N0. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyebutkan secara terperinci bahwa OJK di bentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan mampu mewujudkan sistem kuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi konsumen dan masyarakat.<sup>6</sup>

Selanjutnya, dengan menaggapi hal di atas maka dengan melakukan pembentuka Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di harapkam dapat mendukung serta melindungi dan mengawasi setiap langkah dan tindak tanduk lembaga keuangan. Selain itu OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain, meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian dan kepemilikan di sektor jasa keunagan dengan mempertimbangka aspek positif globalisasi.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di bentuk dan di landasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi:

---

<sup>5</sup>Muliaman D. Hadad, *OJK Way Implementasi Manajemen Perubahan di OJK*, Cet 1 (Jakarta : Gramedia Widiasarana, 2017), h. 90

<sup>6</sup>Otoritas Jasa Keuangan, *Booklet Perbankan Indonesia 2014*, (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2014), h. 3



independensi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, transparansi, dan kewajiban.

Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Bengkulu pada dasarnya sama dengan penjelasan diatas, melihat potensi dunia perbankan yang sangat melaju begitu cepat dan pesat, maka Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pusat melakukan pendirian kantor perwakilan yang didirikan di Provinsi Bengkulu, sehingga tindak tanduk kegiatan dunia perbankan di Bengkulu dapat diawasi secara maksimal. Dengan berdirinya kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Bengkulu di harapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh terutama dalam mengawasi setiap lembaga keuangan.

#### **4. Fungsi, Tugas dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan.

Sedangkan berkaitan dengan tugas utama dari Otoritas jasa keuangan (ojk) menurut pasal 6 UU No. 21 Tahun 2011, adalah melakukan pengawasan terhadap :

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal

- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya.<sup>7</sup>

Adapun wewenang yang di miliki oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah untuk melaksanakan tugas pengaturan dalam pengawasan di sektor perbankan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 UU OJK huruf a, OJK mempunyai wewenang:

- a. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank, yang meliputi:
  - a) Perizinan untuk mendirikan bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, marger, konsolidasi, dan akuisi bank serta penjabutan izin usaha bank.
  - b) Kegiatan usaha bank antara lain, sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa.
- b. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank, yang meliputi:
  - a) Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, resiko kecukupan, modal minimum, batas maksimum

---

<sup>7</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Buku Saku.....*, h. 5

pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank.

- b) Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank.
- c) Sistem informasi dibitur.
- d) Pengajuan kredit (*credit testing*).
- e) Standar akuntansi bank.<sup>8</sup>

Selanjutnya terkait dengan pengawasan lembaga keuangan (bukan dan non bank), meliputi:

- a. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan
- b. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang di laksanakan oleh kepala eksekutif
- c. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan disektor jasa keuangan
- d. Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan/atau pihak tertentu
- e. Melakukan penunjukan pengelola statuter
- f. Menetapkan penggunaan statuter

---

<sup>8</sup> Pasal 7 UU OJK No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

- g. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan
- h. Memberikan da/atau mencabut izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakuakn kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lainnya.<sup>9</sup>

#### **1. Nilai-Nilai Strategi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**

##### a. Integritas

Bertindak objektif, adil, dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen.

##### b. Profesionalisme

Bekerja dengan penuh tanggung jawab berdasarkan kompetensi yang tinggi untuk mempercayai kinerja terbaik.

##### c. Sinergi

Berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal secara produktif dan berkualitas.

##### d. Inklusif

Terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan serta memperluas kesempatan dan akses industri keuangan.

---

<sup>9</sup>Otoritas Jasa Keuangan, *Buku Saku.....*, h. 6-8

e. Visioner

Memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat ke depan (*forward looking*) serta dapat berfikir di luar kebiasaan (*out of the box thinking*).<sup>10</sup>

## 2. Struktur Organisasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Struktur Organisasi OJK terdiri atas:

- a. Dewan Komisioner OJK
- b. Pelaksana Kegiatan Operasional

Struktur Dewan Komisioner terdiri atas:

- a. Ketua merangkap anggota
- b. Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap anggota
- c. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota
- d. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota
- e. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan Dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap anggota
- f. Ketua Dewan Audit merangkap anggota
- g. Anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen

---

<sup>10</sup>Muliaman D. Hadad, *Laporan...*, h. 13

- h. Anggota *Ex-officio* dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia
- i. Anggota *Ex-officio* dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat Eselin I Kementerian Keuangan.

## **B. Gambaran Umum SMA Negeri 7 Kota Bengkulu**

### **1. Sejarah Singkat SMA Negeri 7 Kota Bengkulu**

Pada tahun 1995, Pemerintah pusat memprogramkan sekolah unggulan di tiap-tiap daerah. Demikian halnya di Provinsi Bengkulu, program membuat sekolah unggulan menggunakan Unit Sekolah Baru yaitu SMA Negeri 7, sehingga pada tahun pelajaran 1996-1997 sekolah unggulan berdiri dimasa itu dengan Kepala Kantor Wilayah Pendidikan dan Kebudayaan adalah Bpk. Drs. H. M. Yunus Said, MBA. Pelaksana Tugas kepala sekolah SMA Unggulan di SMA Negeri 7 adalah Bpk. Drs. Hamid Wazir dengan tugas tetapnya adalah Kasi Kurikulum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu.

Guru-guru sekolah unggulan daerah ini direkrut melalui seleksi dari seluruh daerah di Provinsi Bengkulu yaitu sebagai berikut : 1. Drs. Samsurizal. Msi 2. Drs. Marzuki. 3. Drs. Trisunarso. 4. Drs. Supama. 5. Drs. Eko Purwoko. 6. Drs. Sulaiman Efendi. 7. Drs. Yulian Anwar 8. Dra. Azizah Burhanan. 9. Drs. Imran Z. 10. Drs. Hanif 11. Drs. Basrial. 12. Dra. Elismar.

13. Nirwan Sukandri, S.Pd 14. Drs. Anton Sutikno. Tata Usaha adalah: 1. Bertasari 2. Tahanudin 3. Baharudin. 4. Nazilah 5. Ahmad Pond. 6. Yustini Riyanti

Pada tanggal 2 Agustus 1997 SMA Negeri 7 didefinisikan dengan kepala sekolah Bpk. Drs. Samsurizal. M.Si. Jumlah siswa ada 50 orang yang terdiri dari 2 kelas. Pada tahap pertama perekrutan siswa dilaksanakan oleh Kanwil Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu. Selanjutnya pada tahun 2001 kepala sekolah Drs. Samsurizal. M.Si digantikan oleh Bpk. Yunirhan S.Pd, dan pada tahun 2007 Bpk Yunirhan digantikan oleh Ibu Dra. Susi Rahayu. Dalam rangka memperkuat dasar pengelolaan pada tahun 2006 di turunkan SK penunjukan Sekolah Menengah Atas Negeri 7 menjadi SMA Plus.

Pada tahun 2007 kepala sekolah Dra. Susi Rahayu digantikan oleh Bpk. Yunan Danim. M.Pd. Sedangkan Kepala Tata Usaha dari Ibu Berthasari pada tahun 2007 digantikan oleh Bpk Tahanudin. Dalam rangka untuk memberikan keleluasaan pengelolaan (MBS) maka dikeluarkan SK Manajemen peningkatan Mutu Berbasis Sekolah ( Otonomi Sekolah) oleh Bpk Walikota pada tahun 2009. Selanjutnya pada tahun 2009 kepala sekolah Bpk. Yunan Danim M.Pd digantikan oleh Bpk. Drs Eko Purwoko.

Dari tahun ke tahun program keunggulan selalu mengalami inovasi demi untuk mendapatkan output yang lebih baik. Seting

inovasi pengelolaan tahun pembelajaran 2010 – 2011 juga akan mengalami beberapa penyempurnaan, baik menyangkut kurikulum, sarana dan disiplin siswa serta hal lain untuk mendukung proses pembelajaran.

## **2. Visi dan Misi SMA Plus Negeri 7 Bengkulu**

### **a. VISI :**

Terwujudnya sekolah yang unggul dalam IMTAQ dan IPTEK

### **b. MISI :**

1. Melaksanakan Rekrutmen siswa yang berkompetensi untuk mencapai IMTAQ dan IPTEK yang optimal
2. Melaksanakan pembelajaran yang optimal
3. Melaksanakan pembentukan sikap melalui IMTAQ
4. Melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler secara optimal
5. Menumbuh kembangkan minat belajar
6. Menciptakan kultur sekolah yang kondusif
7. Melaksanakan fungsi evaluasi secara berkelanjutan dan obyektif
8. Menciptakan lulusan yang unggul dalam IMTAQ dan IPTEK



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Untuk melakukan penelitian mengenai Preferensi Siswa Dalam Memilih Industri Jasa Keuangan (Studi Pada Kegiatan Sosialisasi Otoritas Jasa Keuangan Di SMA Negeri 7 Kota Bengkulu), maka penulis mengumpulkan data dengan melakukan wawancara langsung kepada objek penelitian.

#### A. Data Informan

Informan dalam penelitian ini adalah siswa-siswi SMA Negeri 7 Kota Bengkulu yang telah mendapatkan sosialisasi dari Otoritas Jasa Keuangan tentang Mengenal Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan.

**Tabel 4.1**

**Data Informan Penelitian**

No	Nama	Kelas	Asal Sekolah
1	M. Pernanda Putra	XI IPA 5	SMA Negeri 7 Kota Bengkulu
2	Gaza Fadhlán	XI IPA 5	SMA Negeri 7 Kota Bengkulu
3	M. Septian Fajri	XI IPA 5	SMA Negeri 7 Kota Bengkulu
4	Amanda Putri	XI IPA 5	SMA Negeri 7 Kota Bengkulu
5	Yosua P. H	XI IPA 5	SMA Negeri 7 Kota Bengkulu
6	Putri Ayu M	XI IPA 5	SMA Negeri 7 Kota Bengkulu
7	Enjelita Aisyah	XI IPA 5	SMA Negeri 7 Kota Bengkulu

8	Salsabila	XI IPA 5	SMA Negeri 7 Kota Bengkulu
9	Itsna Sukma Alifia	XI IPA 5	SMA Negeri 7 Kota Bengkulu
10	Fritzki	XI IPA 5	SMA Negeri 7 Kota Bengkulu
11	M. Reyhan Juliantoni	XI IPA 5	SMA Negeri 7 Kota Bengkulu
12	Yohanes Bonatua N	XI IPA 5	SMA Negeri 7 Kota Bengkulu
13	Amanda Olivia	XI IPA 5	SMA Negeri 7 Kota Bengkulu
14	Putri Rizki Purnama	XI IPA 5	SMA Negeri 7 Kota Bengkulu
15	Berlian Paulina	XI IPA 5	SMA Negeri 7 Kota Bengkulu
16	M. Revil Syaputra	XI IPA 5	SMA Negeri 7 Kota Bengkulu
17	Bunga Anisa Berta	XI IPA 5	SMA Negeri 7 Kota Bengkulu
18	Armelia Yundarti	XI IPA 5	SMA Negeri 7 Kota Bengkulu
19	Rivando Siantuti	XI IPA 5	SMA Negeri 7 Kota Bengkulu
20	M. Feiry Rizaaldi	XI IPA 5	SMA Negeri 7 Kota Bengkulu
21	Alsima J	XI IPA 5	SMA Negeri 7 Kota Bengkulu
22	Putri Salsabila	XI IPA 5	SMA Negeri 7 Kota Bengkulu
23	Tania Indry Wati	XI IPA 5	SMA Negeri 7 Kota Bengkulu
24	Umiatin Sovia	XI IPA 5	SMA Negeri 7 Kota Bengkulu
25	Firza Dwi Amanda	XI IPA 5	SMA Negeri 7 Kota Bengkulu
26	Ummi Sulmah	XI IPA 5	SMA Negeri 7 Kota Bengkulu
27	M. Randy Savero	XI IPA 5	SMA Negeri 7 Kota Bengkulu
28	Afif Sanjaya	XI IPA 5	SMA Negeri 7 Kota Bengkulu

**B. Preferensi Siswa dalam Memilih Industri Jasa Keuangan Setelah Mendapatkan Sosialisasi dari Otoritas Jasa Keuangan**

**1. Instrumen Data Preferensi**

**Tabel 4.2**

**Instrumen Data Preferensi**

	Nama	Instrumen preferensi					
		Bank	BMT	Asuransi	Pasar Modal	Koperasi	Pegadaian
1	Pernanda	✓					
2	Gaza					✓	
3	M. Septian	✓					
4	Amanda	✓					
5	Yosua P.						
6	Putri Ayu						
7	Enjelita	✓					
8	Salsabila	✓					
9	Itsna S. A	✓					
10	Fritzki	✓					
11	M.Reyhan						✓
12	Yohanes B						✓
13	Olivia	✓					
14	Putri Rizki	✓					
15	Berliana						
16	M. Revil						✓
17	Bunga						
18	Armelia						✓
19	Rivando S	✓					✓
20	M. Feiry R						
21	Alsima J						
22	Putri S						
23	Tania						
24	Umiatin					✓	
25	Firza Dwi					✓	
26	Ummi	✓					
27	M. Randy						
28	Afif S						

Siswa SMA Negeri 7 Kota Bengkulu mendapatkan sosialisasi tentang industri jasa keuangan ketika mereka masih berada di kelas X (sepuluh) yang berlokasi di masjid sekolah itu sendiri, sosialisasi ini di adakan oleh pihak sekolah dengan mendatangkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai narasumber dan menyampaikan materi tentang industri jasa keuangan kepada siswa yang berkesempatan untuk mengikuti sosialisasi tersebut.

Sosialisasi ini berlangsung pada bulan Januari 2019 dengan memfokuskan pesertanya hanya kepada anak-anak kelas X (sepuluh) saja, sosialisasi ini pun rutin diadakan di sekolah ini untuk menambah wawasan siswa terhadap industri jasa keuangan.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada informan peserta sosialisasi dari Otoritas Jasa Keuangan sebagian di antara mereka tidak ada yang mengingat siapa yang menyampaikan materi pada saat sosialisasi, hal tersebut disebabkan oleh sudah lamanya kegiatan itu berlangsung menjadikan ingatan mereka terhadap pameri sudah berkurang. Yang mereka ingat hanyalah materi di sampaikan oleh pihak Otoritas Jasa Keungan (OJK).

Selain itu siswa-siswi ini sebelumnya tidak pernah mendapatkan sosialisasi tentang industri jasa keuangan, mereka hanya mendapatkan sosialisasi di sekolah saja, dengan demikian pengetahuan mereka terhadap jasa keuangan itu tidak terlalu banyak yang mereka tahu seperti dalam perbankan yang mereka tahu hanya

untuk menabung dan meminjam dana saja padahal masih banyak produk-produk lainnya yang ada di dalam perbankan itu sendiri.

Seperti halnya pada saat melakukan wawancara kepada informan peserta sosialisasi dari Otoritas Jasa Keuangan, hasil yang peneliti dapatkan adalah:

Wawancara kepada M. Perdana, Gaza Fadhlan, M.Septian, Yosua, Enjelita Aisyah, Salsabila, Itsna Sukma, Berlian Paulina, Dan M. Randy, siswa-siswi SMA Negeri 7 Bengkulu, dari informan tersebut peneliti mendapatkan jawaban yang sama atas pertanyaan-pertanyaan yang di ajukan, “pada saat setelah sosialisasi mereka sedikit lebih mengetahui mengenai industri jasa keuangan dan mereka pun hanya mengetahui pengertian dan fungsi dari jasa keuangan”.

Adapun wawancara yang di lakukan pada Yohanes Bonatua, dia menyampaikan bahwa sebelum adanya sosialisasi dari OJK: “setelah saya mendapatkan sosialisasi dari ojk saya menjadi mengerti dan paham tentang industri jasa keuangan dan berapa pentingnya jasa keuangan dari saat ini hingga untuk kedepannya”.

Pendapat dari Putri Rizki Purnama, dia berpendapat bahwa: “sebelum adanya sosialisasi yang saya ketahui mengenai industri jasa keuangan ialah industri yang terdiri dari bank dan pegadaian. Dan setelah adanya sosialisasi tentang industri jasa keuangan adalah

tentang tugasnya, macam-macamnya dan saya juga memahami fungsinya”.

Selanjutnya pendapat dari M. Ferry dan Aisima Jinur, bahwa: “setelah adanya sosialisasi mereka jadi lebih memahami apa itu industri jasa keuangan dan menambah keyakinan mereka untuk menggunakan jasa-jasa yang ada di industri keuangan dan mereka pun lebih tertarik menggunakan jasa perbankan di bandingkan jasa lainnya dikarenakan menurut mereka, mereka merasa lebih nyaman menggunakan jasa itu”.

Sedangkan menurut Amanda Putri, berpendapat bahwa:

“lembaga yang ada di industri jasa keuangan adalah bank, pegadaian, asuransi, dan koperasi, dan saya lebih memilih bank dari pada jasa keuangan lainnya di karenakan untuk saya bank lebih terasa aman untuk menitipkan uang saya dan di bank itu terasa lebih nyaman”.

Menurut M. Revil mengatakan bahwa: “lembaga yang ada didalam industri jasa keuangan adalah pegadaian dan perbankan, dan saya memilih pegadaian karena ada keluarga saya yang bekerja disana”.

Dari penelitian yang dilakukan peneliti juga mendapatkan bahwa siswa-siswi ini tidak banyak mengetahui tentang produk dan jasa apa saja yang terdapat pada industri jasa keuangan, seperti yang dikatakan oleh Amanda Olivia: “saya hanya mengetahui bahwa yang ada di pegadaian itu adalah investasi emas dan sertifikasi batu mulia sedangkan di perbankan adalah kredit usaha, jasa transfer dan

kliring. Untuk di industri jasa keuangan lainnya yang saya tahu itu bank, bank tempat menipkan uang”.

Sedangkan menurut Armelia Yundari: “lembaga yang ada di dalam industri jasa keuangan ada pegadaian, bank, dan asuransi. Produk yang ada di dalamnya adalah pinjaman dan kartu kredit”.

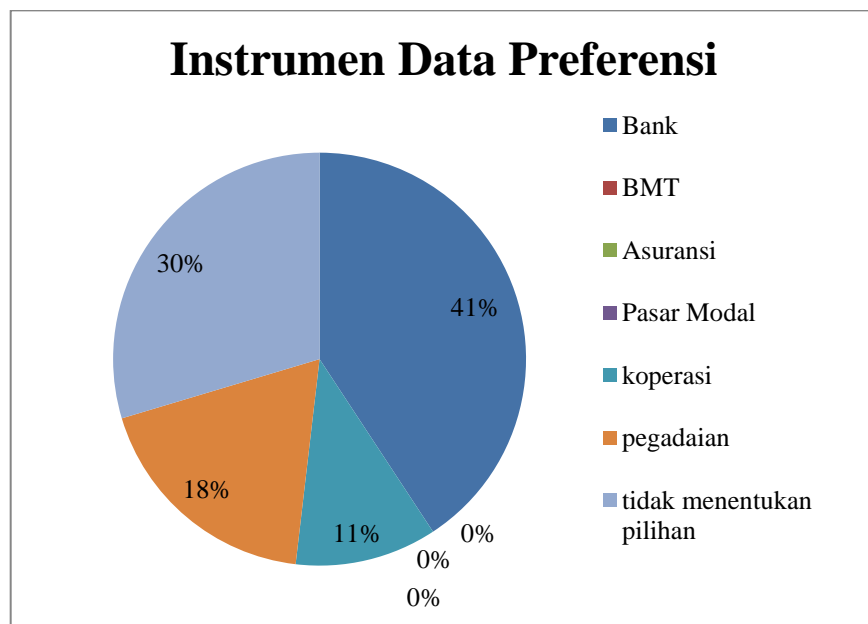
Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa masih banyak siswa yang tidak mengetahui produk-produk dan jasa apa saja yang ada di industri jasa keuangan, yang mereka pahami hanya sebatas bank untuk menabung dan meminjam uang dan pegadaian hanya sebatas tempat menggadaikan barang-barang berharga saja, mereka juga mayoritas hanya tahu dengan bank dan pegadaian saja, sedangkan di dalam industri jasa keuangan terdapat beberapa lembaga keuangan seperti Perbankan, Pasar Modal, Asuransi, Koperasi Dan Pegadaian.

Dari penelitian ini hasil yang penulis dapatkan adalah dengan adanya sosialisasi ini sedikit membantu mereka dalam memahami jasa keuangan dan fungsi keuangan itu sendiri. Walaupun banyak juga di antara mereka yang hanya sekedar mengikuti sosialisasi tersebut dikarenakan anjuran dari guru-guru yang ada di sekolah mereka.

## 2. Grafik Instrumen Data Preferensi

Grafik 4.1

Instrumen Data Preferensi



Dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa 41% siswa SMA Negeri 7 Kota Bengkulu lebih memilih Bank, 11% memilih Koperasi, 18% memilih Pegadaian, 30% tidak memilih sama sekali industri keuangan, dan untuk Pasar Modal, Asuransi dan BMT siswa SMA Negeri 7 Kota Bengkulu tidak berminat sama sekali.

### C. Pembahasan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selain berfungsi mengawasi dan mengatur sektor jasa keuangan juga berfungsi sebagai lembaga yang memberikan perlindungan kepada masyarakat, serta juga memberi edukasi kepada masyarakat terkait seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan. Maka, hal ini lah yang membedakan pengawasan sebelumnya dengan



pengawasan di bawah OJK. Perlindungan dan edukasi yang dimaksud diarahkan dengan tujuan, meningkatkan kepercayaan dari investor dan konsumen dalam setiap aktivitas dan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan. Kemudian memberikan peluang dan kesempatan untuk perkembangan sektor jasa keuangan secara adil, efisien, dan transparan.<sup>1</sup> Perlindungan konsumen yang dimaksud oleh OJK bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan konsumen, dan menumbuhkan kesadaran pelaku usaha jasa keuangan mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan.<sup>2</sup>

Dari pernyataan diatas dapat dipahami bahwa peran OJK adalah mengawasi, mengatur, dan melindungi. Peran OJK tersebut sangat berpengaruh terhadap sektor jasa keuangan, namun dibalik itu semua juga sangat berpengaruh dan membantu masyarakat dalam permasalahan yang ditemukan pada sektor jasa keuangan. Karena, permasalahan yang dialami oleh masyarakat dapat di tindak lanjuti oleh OJK berdasarkan ketentuan-ketentuan dari peran OJK itu sendiri. Namun, sebaliknya Peran OJK masih belum dipahami oleh masyarakat khususnya masyarakat Kota Bengkulu dan juga edukasi masyarakat terhadap industri jasa keuangan masih kurang. Padahal OJK sering melakukan edukasi kepada masyarakat, baik itu kalangan pelajar, mahasiswa. Oleh sebab itu, diharapkan periode Dewan Komisioner OJK selanjutnya dapat menjaga industri keuangan

---

<sup>1</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan Edisi Ke 2*,(Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2015), h. 53

<sup>2</sup>POJK Nomor : 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

tetap stabil di tengah kondisi ekonomi global yang bergejolak. Tantangan OJK ke depan adalah bagaimana mendorong lebih banyak orang Indonesia yang melek (terlibat) dalam industri keuangan. Untuk itu OJK harus lebih mengintensifkan edukasi, komunikasi serta sosialisasi.<sup>3</sup>

Dari sisi edukasi dan sosialisasi, OJK telah melakukan upaya untuk meningkatkan literasi keuangan dengan mendorong perbankan ikut serta dalam program Laku Pandai. Dengan upaya meningkatkan literasi keuangan ke berbagai daerah diharapkan makin banyak orang yang bertransaksi melalui bank. Upaya dalam membuat masyarakat melek keuangan bukanlah hanya tanggung jawab OJK tetapi juga seluruh pihak termasuk mahasiswa. Untuk itu OJK mengajak mahasiswa bersama-sama melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat minimal lingkungan keluarganya di daerah. Sementara untuk menghindari masyarakat terjebak dalam penipuan investasi bodong.

Sosialisasi merupakan proses belajar, pada dasarnya sifat manusia adalah tidak akan pernah puas untuk belajar sesuatu hal yang belum diketahuinya. Sosialisasi juga merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sebuah sistem pada seseorang dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksinya. Sosialisasi ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi dan kebudayaan dimana individu berada,

---

<sup>3</sup> Edukasi dan Sosialisasi Masih Jadi Tantangan OJK Kedepan, <http://infobanknews.com/edukasi-dan-sosialisasi-masih-jadi-tantangan-ojk-kedepan/>, di akses pada hari Sabtu 30 November 2019, Pukul 10.26

selain itu juga ditentukan oleh interaksi pengalaman-pengalaman serta kepribadiannya.

Sosialisasi sangat dibutuhkan dalam upaya meningkatkan pemahaman dan pilihan-pilihan (preferensi) masyarakat terhadap industri jasa keuangan. Dikarenakan pada saat saya melakukan penelitian dan bertanya kepada informan dalam penelitian, hasil yang penulis dapatkan bahwa dengan adanya sosialisasi dapat membantu mereka dalam memahami suatu hal khususnya dalam Industri Jasa Keuangan, walaupun diantara mereka juga masih ada yang tidak memahami tentang materi yang disampaikan.

Diharapkan sosialisasi seperti ini rutin di lakukan di setiap sekolah-sekolah, bukan hanya sekolah yang ada di Kota Bengkulu saja melainkan setiap sekolah yang ada di Provinsi Bengkulu, suapaya kesadaran masyarakat terhadap industri jasa keuangan dapat meningkat dan penipuan-penipuan terhadap masyarakat tentang keuangan bisa di minimalisir.

Kebanyakan dari informan yang ada mereka hanya tertarik pada perbankan dan pegadaian, karena menurut mereka hanya dua lembaga ini saja yang mereka sedikit pahami tugas dan fungsinya. Diharapkan dengan adanya sosialisasi ini dapat membantu mereka dalam memilih industri jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan mereka dan membuat mereka melek terhadap keuangan, dapat mengurangi tindak penipuan dalam kedok investasi ataupun tabungan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa preferensi siswa dalam memilih industri jasa keuangan berdasarkan nyaman dan aman, serta ke ikut sertaan keluarga mereka di dalam industri tersebut, seperti ada saudara mereka yang bekerja di sana maka mereka anak menggunakan jasa keuangan tersebut. Dan dari penelitian ini hasil yang penulis dapatkan juga dengan adanya sosialisasi ini sedikit membantu mereka dalam memahami industri jasa keuangan dan keuangan itu sendiri.

#### B. Saran

Bagi pihak Otoritas Jasa Keuangan diharapkan dapat memberikan sosialisasi merata kepada masyarakat, tidak hanya masyarakat perkotaan saja, melainkan didesa juga harus ada sosialisasi tentang Industri Jasa Keuangan, dan dengan adanya sosialisasi di tingkat sekolah ini telah menjadi salah satu langkah yang baik untuk meningkatkan preferensi dalam memilih Industri Jasa Keuangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Noor, Ruslan. *Konsep Distribui dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2013
- Aditya Setyawan, Dodiet. *Konsep Dasar Masyarakat*. Surakarta : ASKEB, 2012
- Anita Sari, Agus. “*Analisis peran otoritas jasa keuangan dalam mengawasi investasi di provinsi lampung dalam persepekti ekonomi islam*”. Lampung: Skripsi Sarjana, UIN Raden Intan Lampung, 2018
- Asnaini., Herlina Yustati, *Lembaga Keuangan Syariah (Teori dan Praktiknya Di Indonesia)*. Cet I, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2017
- Bagus Wirawan, Ida. *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma*. Edisi Pertama Jakarta : Kencana, 2012
- Djaelani, Aunu Rofiq, “Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif”, *Jurnal FPTK*, Volume XX, Nomor 1, 2013
- Ermawati dan irham pakawaru, “*strategi promosi otoritas jasa keuangan (ojk) provinsi sulawesi tengah dalam edukasi dan perlindungan konsumen di kota palu*”. Palu: Dose fakultas syariah dan ekonomi islam IAIN
- Fahmi Irham, *Manajemen Perbankan Konvensional Dan Syariah*, Edisi Pertama, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2015
- Hadad, Muliaman D, *OJK Way Implementasi Manajemen Perubahan di OJK*, Cet 1 Jakarta : Gramedia Widiasarana, 2017
- Handoyo, Eko DKK, *Studi Masyarakat Indonesia*. Yogyakarta : Ombak IKAPI, 2015
- Harahap, “Penelitian Kepustakaan”, *Jurnal Iqra’*, Volume 08, Nomor 01
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Ed Kedua, Jakarta: Kencana, 2012
- Hidayat Amin, “*Peran OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Pada Masyarakat Terhadap Lembaga Jasa Keuangan (Studi di Kantor Ojk Purwokerto)*”, Purwokerto: Skripsi Program Studi Ekonomi Syari’ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2017

- Ilmanila Faza, Nabila, “*Analisis Kontribusi Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Konvensional Dan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2014-2017*”, Yogyakarta: Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2017
- Junaidi, “Persepsi Masyarakat Untuk Memilih dan Tidak Memilih Bank Syariah (Studi Kota Palopo)”, *Jurnal Fokus Bisnis*, Volume 14, No. 02, Desember 2015
- Kasim, Musliar. *Mengenal Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan*. Jakarta : Dewan Komisioner OJK, 2014
- Lestari, Hesty. “Otoritas Jasa Keuangan : Sistem Baru Dalam Pengaturan dan Pengawasan Sektor Jasa Keuangan”. *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 12, Nomor 3, 2012
- Machmudah, Rifa’atul, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Non Muslim Menjadi Nasabah Di Bank Syariah*.
- Madnasir dan Khoirudin, “*Etika Bisnis Dalam Islam*”. Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung.
- Mappiare, Andi. “*Psikologi Orang Dewasa Bagi Penyesuaian Dan Pendidikan*”. Surabaya, Usana Offsetprinting
- Martana, Salmon Priaji, “Problematika penerapan Metode Field Research Untuk Penelitian Arsitektur Vernakular di Indonesia”, *Jurnal Dimensi Teknik Arsitektur*, Volume 3, Nomor 1, 2006
- Modul WPPE, *Mekanisme Perdagangan Efek Struktur Pasar Modal Indonesia*, Jakarta: TICMI, 2016
- Nugroho, J. Setiadi, *Perilaku Konsumen*. Cet-Ke 5, Jakarta, Kencana Prenada Meida Group, 2013
- Otoritas Jasa Keuangan, *Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan Edisi Ke 2*, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2015
- Otoritas Jasa Keuangan, *Booklet Perbankan Indonesia 2014*, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2014
- Otoritas Jasa Keuangan, *Mengenal Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan*, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2014

POJK Nomor : 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Rahman,Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995

Rianto Al Arif, Nur. *Teori Mikroekonomi*. Kencana: Jakarta, 2014

Salman Kautrsar Riza, *Akuntansi Perbankan Syariah: Berbasis PSAK Syariah*, Edisi Kedua, Jakarta: PT. Indeks, 2017

Satria Rio, *Masa depan industri Keuangan Syariah dalam Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan*

Subandi, “Deskripsi Kualitatif Sebagai Suatu Metode Dalam Penelitian Pertunjukan”, *Jurnal Harmonia*, Volume 11, Nomor 2

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Ed.Rev, Bandung: Alfabeta, 2013,

Soemitra Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Medan, 2009

Susyanti, Jeni. *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*. Cet. I, Malang : Empat Dua, 2016

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 *tentang Otoritas Jasa Keuangan*, Pasal 1 <https://iainkediri.ac.id/praktek-bisnis-industri-keuangan-non-bank-inkb-syariah-dalam-perspektif-fiqh-muuamalah/> diakses pada senin 29 April 2019, pukul 17.00 WIB